

| KORAN
DIGITAL

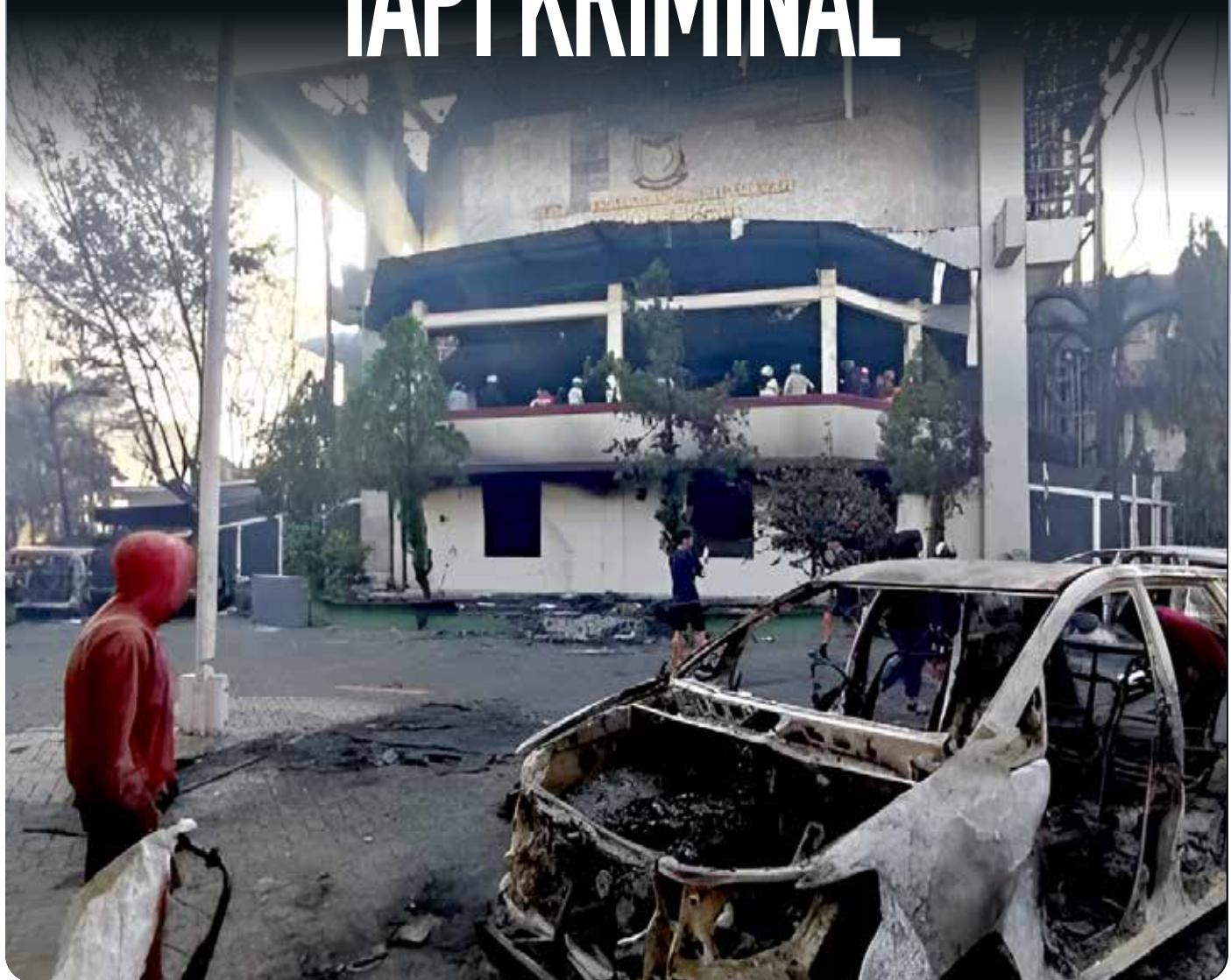
PERTAMA
& GRATIS

KORAN **SULSEL**

TERPERCAYA & TERDEPAN **.COM**

| EDISI SELASA
2 SEPTEMBER 2025

KAPOLRESTABES: ANARKIS BUKAN MAHASISWA, TAPI KRIMINAL





Suasana terkini kondisi Kantor DPRD Kota Makassar usai dibakar massa di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA/Darwin Fatir)

KAPOLRESTABES: ANARKIS BUKAN MAHASISWA, TAPI KRIMINAL

MAKASSAR — Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen mengawal setiap aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung damai. Namun, ia menekankan tindakan anarkis tidak bisa lagi dianggap sebagai gerakan mahasiswa maupun organisasi masyarakat, melainkan perbuatan kriminal yang harus ditindak tegas.

"Komitmen kepolisian adalah mengawal aksi unjuk rasa damai, tetapi akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan anarkis. Yang tidak boleh disakiti adalah pengunjuk rasa, bukan anarki," kata Arya di Makassar, Senin (1/9/2025).

Arya mengakui insiden bentrokan pada 29 Agustus lalu ter-

jadi karena situasi tidak terkenali. Saat itu, jumlah aparat yang bertugas hanya sekitar 200 personel, sementara massa mencapai 2.000 orang yang tersebar di DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel.

Ia menjelaskan, aparat yang diturunkan tidak dibekali senjata, hanya menggunakan tameng sebagai bentuk komitmen Kapolri untuk menghindari kekerasan terhadap massa. Namun, kondisi berubah ketika massa mulai melempari aparat dengan batu dan bom molotov. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak, aparat kemudian menarik diri.

"Awalnya isu yang diangkat massa terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sikap an-

ggota DPR RI. Tetapi di lapangan, sasaran justru berubah, menyasar aparat kepolisian. Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa bantuan TNI. Bahkan mobil pemadam kebakaran pun dihalangi massa," jelasnya.

Atas insiden tersebut, Arya menyampaikan duka mendalam atas korban meninggal, termasuk staf DPRD Makassar yang tewas dalam kebakaran. Ia menegaskan, keputusan Presiden dan perintah Kapolri sangat jelas: seluruh pelaku kerusuhan harus diproses sesuai hukum.

"Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis bukan lagi masyarakat, bukan lagi mahasiswa, bukan lagi ormas. Mereka adalah penjahat, dan akan kami tindak tegas," tegas Arya. (ant/KS)

PEMPROV SULSEL TERAPKAN WFA BAGI ASN 1-4 SEPTEMBER

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi memberlakukan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN lingkup Pemprov mulai 1 hingga 4 September 2025.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat memimpin apel di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (1/9/2025). "Hari ini saya sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulsel, silakan WFA mulai tanggal 1 sampai 4. Namun saya tekankan,

jangan sampai mengurangi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Andi Sudirman menegaskan bahwa orientasi utama pemerintahan adalah memenuhi kebutuhan rakyat. "Saya harap kehadiran kita semua dalam pemerintahan ini betul-betul untuk kebutuhan masyarakat, karena saya lahir dari masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, Gubernur juga mengimbau seluruh ASN dan non-ASN untuk ikut menyebarluaskan pesan positif tentang pentingnya menjaga keamanan dan

kedamaian di Sulsel. "Saya minta kepada semua pegawai untuk menyuarakan kepada kerabat dan keluarga bahwa Sulsel aman, Sulsel damai," tandasnya.

Tidak hanya Pemprov Sulsel, Pemerintah Kota Makassar juga mengambil langkah serupa dengan memberlakukan kebijakan WFA. Bahkan, Dinas Pendidikan dan sejumlah kampus di daerah tersebut memutuskan menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai antisipasi potensi gejolak aksi massa. (ant/KS)

Editor: Agus S



Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memberikan sambutan pada kegiatan apel pagi di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (1/9/2025)



Suasana Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dijaga personil TNI seusai dibakar massa saat demonstrasi berujung kerusuhan pada Sabtu, (30/8/2025) dini hari, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/9/2025). ANTARA/Darwin Fatir

DPRD SULSEL CARI KANTOR SEMENTARA USAI GEDUNG DIBAKAR MASSA

MAKASSAR— Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga kini belum menentukan lokasi kantor sementara setelah gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo habis terbakar akibat aksi massa pada Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk menentukan aset pemerintah yang bisa dipakai sementara. "Kami masih berkoordinasi dengan Pak Gubernur, aset yang mana yang bisa digunakan sementara," ujarnya di Makassar, Senin (1/9/2025).

Beberapa opsi kantor dinas milik Pemerintah Provinsi disebut bisa dipakai, salah satunya Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Meski begitu, Cicu belum dapat memastikan pilihan tersebut. "Saat ini kami masih menggunakan Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip, sambil membersihkan ruangan yang masih bisa dipakai," tambah mantan anggota DPRD Makassar itu.

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir, menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan pimpinan dewan terkait lokasi sementara bagi 84 anggota DPRD. "Mau di daerah selatan atau utara, kami ikut saja, karena tugas kami melayani anggota,"

ujarnya.

Saat ditanya soal estimasi kerugian akibat kebakaran, Jabir mengaku belum bisa memastikan. "Belum diketahui, nanti dihitung badan aset daerah baru bisa diketahui," katanya.

Seperti diketahui, gedung DPRD Sulsel hangus terbakar usai diserang massa pada Sabtu dini hari. Tidak hanya api yang melalap bangunan, sejumlah orang juga memanfaatkan situasi untuk menjarah barang-barang di dalam kantor dewan. Saat kejadian, aparat kepolisian tidak terlihat di lokasi, hanya anggota TNI yang berusaha menenangkan massa. (ant/KS)

BKN ANUGERAHKAN PANGKAT ANUMERTA UNTUK ASN KORBAN KEBAKARAN GEDUNG DPRD MAKASSAR

JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengangugerahkan pangkat anumerta kepada tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal dunia dalam insiden kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (29/8/2025) malam.

"Sebagai Kepala BKN, mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban, terutama keluarga yang ditinggalkan," kata Zudan melalui siaran pers yang diterima, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, pemerintah bergerak cepat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, yakni BKN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Taspen, untuk memastikan ASN terdampak memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan manajemen ASN.

"Mereka adalah contoh ASN yang berdedikasi bagi bangsa dalam kondisi apapun. Negara

Selain penghargaan tersebut, keluarga korban juga akan menerima hak-hak keuangan, antara lain:

- Pensiun janda/duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun
- Santunan kematian kerja
- Uang duka
- Biaya pemakaman
- Bantuan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan.

Tiga ASN yang gugur dalam insiden itu adalah:

- Saiful Akbar, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tallo
- Muhammad Akbar Basri atau Abay, Staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Makassar
- Sarinawati, Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar.

akan memastikan penghargaan sepantasnya diberikan atas jasa

dan pengabdian mereka," tegas mantan Pj Gubernur Sulsel itu.

Sebagai langkah konkret, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis pemberian Pensiun Janda/Duda Anumerta terhadap para ASN korban kebakaran. Khusus almarhum Saiful Akbar, yang menjabat Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tallo, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Sebelumnya, insiden bermula saat massa demonstrasi memaksa masuk ke Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8) sekitar pukul 19.00 WITA, menjelang rapat paripurna. Massa merusak fasilitas hingga membakar kendaraan. Api kemudian menjalar dan melalap seluruh gedung hingga Sabtu (30/8) dini hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mencatat ada delapan korban dalam peristiwa itu: tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. (ant/KS)



Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.

GUBERNUR SULSEL DAN FORKOPIMDA DEKLARASIKAN KOMITMEN JAGA KEDAMAIAN

MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, akademisi, aktivis, hingga komunitas masyarakat menggelar deklarasi bersama untuk menjaga kedamaian Sulsel.

Kegiatan yang berlangsung di Makassar, Senin (1/9/2025), diinisiasi oleh Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno. Deklarasi juga dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Kajati Sulsel Agus Salim, Dankodaerl VI Makassar Laksda Andi Abdul Azis, Pangdiv 3 Kostrad Mayjen TNI Bangun Nawoko, Pangkodau 2 Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, serta Kabinda Sulsel Brigjen TNI Andi Anshar. Hadir pula para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan se-Sulsel.

"Saya apresiasi komitmen bersama seluruh Forkopimda, rektor, aktivis, OKP, ormas, tokoh agama, ojol, dan tokoh masyarakat dalam melakukan Deklarasi Menjaga Sulsel Damai. Ini adalah langkah penting agar Sulsel tidak lagi mengalami kejadian yang tidak kita harapkan hingga menimbulkan korban jiwa," ujar Gubernur

Andi Sudirman.

Ia berharap deklarasi ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam memperkuat persatuan, mencegah konflik sosial, serta menjaga harmoni di tengah masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun poin-poin Maklumat Deklarasi Damai Sulsel adalah sebagai berikut:

- * Meneguhkan persatuan, dengan berkomitmen menjaga Sulsel sebagai rumah bersama, mengedepankan nilai persaudaraan dan kebinekaan.
- * Menolak segala bentuk kekerasan, termasuk provokasi, ujaran kebencian, hoaks, dan tindakan yang dapat memecah belah masyarakat.
- * Mengutamakan dialog dan musyawarah, dalam menghadapi perbedaan pandangan dengan komunikasi terbuka serta solusi damai sesuai semangat demokrasi dan konstitusi.
- * Bersinergi menjaga kondusivitas, di mana Forkopimda bersama tokoh agama, masyarakat, aktivis, dan kampus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta harmoni sosial.
- * Menjaga netralitas dan kebersamaan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
- * Meneguhkan peran pemuda dan akademisi, memberi ruang bagi

generasi muda, mahasiswa, dan akademisi untuk menyuarakan gagasan solutif, kritis, dan konstruktif demi masa depan Sulsel dan Indonesia yang lebih baik.

"Deklarasi ini adalah ajakan bagi seluruh masyarakat Sulsel untuk bersama-sama menjaga kedamaian, karena kedamaian adalah fondasi utama pembangunan," tutup Andi Sudirman. (ant/KS)

Adapun poin-poin Maklumat Deklarasi Damai Sulsel adalah sebagai berikut:

- Meneguhkan persatuan, dengan berkomitmen menjaga Sulsel sebagai rumah bersama, mengedepankan nilai persaudaraan dan kebinekaan.
- Menolak segala bentuk kekerasan, termasuk provokasi, ujaran kebencian, hoaks, dan tindakan yang dapat memecah belah masyarakat.
- Mengutamakan dialog dan musyawarah, dalam menghadapi perbedaan pandangan dengan komunikasi terbuka serta solusi damai sesuai semangat demokrasi dan konstitusi.
- Bersinergi menjaga kondusivitas, di mana Forkopimda bersama tokoh agama, masyarakat, aktivis, dan kampus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta harmoni sosial.
- Menjaga netralitas dan kebersamaan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
- Meneguhkan peran pemuda dan akademisi, memberi ruang bagi generasi muda, mahasiswa, dan akademisi untuk menyuarakan gagasan solutif, kritis, dan konstruktif demi masa depan Sulsel dan Indonesia yang lebih baik.



PANGDIVIF 3 KOSTRAD TURUN PATROLI, AJAK WARGA MAKASSAR JAGA KEDAMAIAAN

MAKASSAR — Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Mayjen TNI Bangun Nawoko, turun langsung ke jalan bersama prajuritnya untuk melaksanakan patroli di sejumlah titik strategis Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka membawa pesan persatuan dan imbauan agar masyarakat menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Dalam keterangannya, Bangun Nawoko menegaskan bahwa patroli ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. "Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk merangkul masyarakat. Aspirasi silakan disampaikan, tetapi jangan sampai berujung anarkis. Mari kita

jaga ketertiban, mari kita jaga persatuan, karena kerusakan hanya akan merugikan kita semua," ujarnya, Senin (1/9/2025).

Ia menekankan bahwa tugas utama prajurit bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menyampaikan pesan moral agar masyarakat tetap menjunjung tinggi kedamaian. Menurutnya, penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan tertib, damai, serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum maupun merusak fasilitas kota.

"Makassar sebagai kota besar sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga kedamaian kota ini,"

kata Bangun.

Pangdivif 3 Kostrad itu juga berkeliling menyapa warga, mengajak seluruh lapisan masyarakat mengedepankan persatuan, serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memicu keributan. Ia meminta masyarakat dan aparat bersinergi menjaga keamanan kota demi kepentingan bersama.

Patroli yang berlangsung tertib tersebut menjadi momentum kedekatan TNI dengan rakyat. Prajurit Divif 3 Kostrad tampak berbaur dengan warga, memberikan senyum, salam, serta menghadirkan rasa aman di tengah aktivitas masyarakat. Kehadiran mereka di jalanan sekaligus menjadi simbol bahwa TNI sentiasa hadir sebagai pelindung rakyat dan penjaga keutuhan bangsa. (ant/KS)



GRATIS
TANPA IURAN

E-PAPER

koraNusantara

www.koranusantara.com

EDISI SELASA
2 SEP 2025



KSPI DAN KSPSI SEBUT AKSI BURUH DI JAKARTA DISUSUPI “PENUMPANG GELAP”

BACA HALAMAN 2



**LAYANAN TRANSJAKARTA
KEMBALI NORMAL PASCADEMO,
4.907 BUS BEROPERASI**



**Presiden Executive Committee Partai Buruh Said Iqbal (kiri) menjawab pertanyaan media pada se-
la-sela peringatan tiga tahun kebangkitan Partai Buruh di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).**
ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

KSPI DAN KSPSI SEBUT AKSI BURUH DI JAKARTA DISUSUPI “PENUMPANG GELAP”

JAKARTA - Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

“Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah

fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

“Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

“Kehilatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

“Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetapi taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani. (ANT/KN)



Bus Transjakarta melintasi kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). ANTARA/Lia Wanda diani Santosa.

LAYANAN TRANSJAKARTA KEMBALI NORMAL PASCADEMO, 4.907 BUS BEROPERASI

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan sebanyak 4.907 unit bus Transjakarta, mulai dari Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus), non-BRT, bus integrasi, mikrotrans, rusun, hingga Transjabodetabek beroperasi normal pada Selasa (2/9/2025).

"Pagi ini, 4.907 bus beroperasi dan melayani 240 rute Transjakarta dengan normal, baik BRT, Integrasi, Mikrotrans, Rusun, dan Transjabodetabek," ujar Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Selasa

(2/9/2025).

Seluruh rute layanan Transjakarta dan Transjabodetabek telah beroperasi normal sejak Senin (1/9), setelah sempat terganggu pada pekan lalu karena unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta.

Layanan angkutan malam hari (Amari) bahkan sudah berjalan kondusif sejak Minggu (31/8) di seluruh rute.

Ayu menambahkan Transjakarta siap melayani perjalanan masyarakat dengan tarif Rp1 hingga 7 September 2025, seperti ditetapkan oleh Pemerintah

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kebijakan tarif serupa juga berlaku bagi layanan MRT Jakarta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT serta satu pintu tol mengalami kerusakan pasca-demonstrasi beberapa hari lalu.

Seluruh halte yang rusak itu telah dibersihkan mulai Sabtu (30/8), sementara perbaikannya ditargetkan rampung pada 8 atau 9 September 2025. (ANT/KN)



Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung Senin (1/9/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

ANGGARAN PERJALANAN DINAS DPRD JABAR DIALIHKAN UNTUK PERBAIKAN FASILITAS RUSAK

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merealokasi anggaran beberapa pos, salah satunya perjalanan dinas anggota DPRD Jabar, guna pemulihan pasca demonstrasi berakhir ricuh di Bandung.

Realokasi anggaran termasuk pengurangan perjalanan dinas luar provinsi dan luar negeri dari anggota DPRD Jabar ini, kata Dedi, untuk membantu perbaikan beberapa fasilitas yang dirusak massa, hingga pemulihannya ekonomi pasca aksi tersebut.

"Kita bantu. (Pakai dana Pemprov) Iya, kita bantu. Karena DPRD-nya nih lagi ngasih ke kita peluang untuk perbaikan-perbaikan. Banyak katanya mau di-geserin," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Senin (1/9/2025).

Pengalokasian ulang, kata

Dedi, dilakukan karena menurutnya dampak ekonomi akibat aksi tersebut bakal lebih lama berlangsung ketimbang dampak ekskalasi aksi demonstrasi dalam konteks politis yang diduganya bakal surut pada pekan ini.

"Jadi yang di pikiran saya itu kalau politiknya mungkin dalam pekan ini sudah selesai. Tetapi ekonomi yang ditimbulkan itu akan panjang. Nah, kita ini bagaimana agar tidak panjang," katanya.

Pengurangan anggaran perjalanan dinas, dibenarkan Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa, khususnya perampungan anggaran dinas ke luar negeri. Adapun untuk dinas ke luar provinsi, dikatakan masih dalam proses pembahasan.

"Ya kalo keluar negeri iya, dan

kalau kemudian dinas di luar provinsi, kan baru sekarang dibicarakan untuk tidak mengadakan perjalanan ke luar provinsi, lalu kita anggarkan dimasukkan ke kebutuhan-kebutuhan yang juga dikerjasamakan dengan Pemprov," ucap Bucky.

Demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh.

Di Bandung akibat demo tanggal 29-30 Agustus 2025, sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah jembatan Pasupati mengalami kerusakan. (ANT/KN)



Prabowo dan DPR Terima Kritik Soal Tunjangan dan Flexing Pejabat

PRABOWO DIALOG DENGAN BURUH DI ISTANA, TERIMA KRITIK SOAL TUNJANGAN DAN FLEXING PEJABAT

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025), dan mendengarkan langsung kritik dan aspirasi mereka.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan ke-

pada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

"Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

"Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal 'lambat' atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok

bawah," kata Said Iqbal.

Walaupun demikian, Said menekankan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kerasan. "Pada titik itu, Bapak Presiden setuju," kata Said Iqbal.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang keponagan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR," kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

Pertemuan itu, yang menjadi momen berdialog dan silaturahim, kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir. (ANT/KN)



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

MENTERI ESDM BAHLIL BANTAH ISU KELANGKAAN BBM DI SPBU SWASTA

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan BBM yang disebut-sebut terjadi di sejumlah SPBU swasta, karena pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada tahun 2024 beserta tambahan 10 persen.

Bahlil, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam, meminta jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada.

"Gak ada (langka, red.). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kita berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, kuota impornya

diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan," kata Bahlil merespons pertanyaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU-SPBU swasta.

Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM.

"Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional," kata Bahlil.

Jawaban yang sama telah diberikan oleh Bahlil saat ditanya mengenai kelangkaan BBM minggu (27/8). Bahlil saat itu menyatakan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun ini telah mendapatkan kuota impor

yang lebih banyak daripada tahun 2024, yaitu kuota pada tahun 2024 sebesar 100 persen dan ada tambahan 10 persen.

Sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak minggu lalu tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP-AKR.

Di Istana Kepresidenan RI, Senin malam, Bahlil juga merespons pertanyaan mengenai dampak kericuhan yang disertai dengan aksi pembakaran dan penjarahan di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional.

"Aman, migas aman, gak ada masalah," ujar Bahlil. (ANT/KN)



Kepolisian Daerah Jawa Timur saat menggelar konferensi pers terkait kerugian materil akibat aksi anarkis di beberapa daerah di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (1/9/2025) malam. ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim

POLDA JATIM: KERUSUHAN ANARKIS DI SURABAYA TIMBULKAN KERUGIAN RP124 MILIAR

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menaksir kerugian akibat aksi anarkis di Surabaya mencapai sekitar Rp124 miliar lebih, termasuk kerusakan bangunan cagar budaya.

"Kalau total kerugian sementara ditaksir kurang lebih Rp124 miliar. Itu mencakup pembakaran, penjarahan, hingga kerusakan pada sejumlah fasilitas publik," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Senin (1/9/2025) malam.

Ia menegaskan penghitungan kerugian masih sementara karena petugas masih mendata aset-aset terdampak, termasuk Polsek Tegalsari yang merupakan

bangunan cagar budaya, pos lalu lintas, pos laka, hingga fasilitas kepolisian lain.

Abast menambahkan pihaknya saat ini masih mendalami peran para pelaku yang terlibat dalam pembakaran maupun pengrusakan fasilitas kepolisian. Polisi telah menetapkan sejumlah pasal bagi para tersangka.

"Di antaranya Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," ujarnya.

Selain itu, pasal lain yang dit-

erapkan yakni Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas, Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 53 KUHP tentang percobaan kejahatan, serta Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Menurut dia, polisi juga menindaklanjuti berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pelaku pembakaran maupun provokator dalam aksi anarkis tersebut.

"Kami pastikan setiap informasi sekecil apapun baik dari masyarakat maupun media sosial tetap kami dalami untuk mengungkap pelaku sesungguhnya," katanya. (ANT/KN)



Suasana aksi di DPRD Kukar. (Ady/MKG)

AHMAD YANI TURUN TEMUI DEMONSTRAN, AKSI DI DPRD KUKAR BERAKHIR KONDUSIF

TENGGARONG – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Kukar Menggugat di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (1/9/2025), berlangsung kondusif dan berakhir damai. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, bersama jajaran anggota dewan turun langsung menemui massa dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.

Didampingi Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, dan Dan-dim 0906 Kukar, Letkol (Czi) Damai Adi Setiawan. Ketua Ahmad Yani berdiri di atas mobil komando menyampaikan sikap resmi lembaga. Ia menegaskan DPRD Kukar terbuka terhadap kritik serta aspirasi, dan siap mengawal persoalan yang disuarakan mahasiswa serta masyarakat.

"Kita komitmen akan menyampaikan sesuai dengan rule-

nya. Kalau menyangkut undang-undang, kita teruskan ke pusat. Kalau dalam kewenangan DPRD, segera kita tindaklanjuti di daerah," tegas Ahmad Yani.

Sebagai bentuk keseriusan, pimpinan DPRD Kukar mendatangi nota kesepahaman yang diserahkan perwakilan demonstran. Ia menegaskan persoalan yang bisa diselesaikan di daerah akan dikerjakan sesuai kewenangan dewan.

Ahmad Yani juga mengapresiasi sikap damai para peserta aksi. Menurutnya, kehadiran mahasiswa dan masyarakat di lapangan menjadi bagian penting dari proses demokrasi.

"Karena mahasiswa panas-panasan di sini, kami anggota DPRD juga ikut bersama-sama di lapangan," ucapnya.

Setelah aspirasinya diterima,

ratusan massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu, Koordinator Lapan-gan (Korlap) Aksi, Wawan Ahmad menegaskan bahwa Aliansi Kukar Menggugat selanjutnya akan bergerak menuju DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Karena kawan-kawan di Samarinda juga akan menggelar aksi, maka kami berangkat untuk bersama-sama mereka. Perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama," tutupnya.

Rombongan massa berangkat dari Tenggarong menggunakan kendaraan roda dua dengan pengawalan aparat kepolisian. Sepanjang perjalanan menuju Samarinda, mereka mengibarkan bendera lembaga, sambil melakukan konvoi dengan tertib.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Korlap Aliansi Kukar Menggugat, Wawan Ahmad. (Ady/MKG)

USAJ AKSI DAMAI DI KUKAR, ALIANSI KUKAR MENGGUGAT RAMAIKAN DEMONSTRASI DI SAMARINDA

TENGGARONG – Ratusan massa Aliansi Kukar Menggugat tak berhenti setelah menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (1/9/2025). Usai menggelar aksi damai yang berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mereka langsung bergerak ke Samarinda untuk melanjutkan perjuangan.

Dengan konvoi kendaraan roda dua yang dikawal aparat kepolisian, rombongan massa meninggalkan Tenggarong menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sepanjang perjalanan, bendera lembaga dikibarkan tinggi-tinggi, menandai semangat kolektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Langkah ini menjadi simbol keseriusan mereka mengawal berbagai isu, dari regulasi hingga kebijakan daerah, yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Aliansi menegaskan perjuangan tidak berhenti di tingkat kabupaten, melainkan harus diteruskan ke level provinsi hingga pusat.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Wawan Ahmad, menyebut keberangkatan massa ke Samarinda adalah wujud solidaritas lintas daerah. "Kare-

na kawan-kawan di Samarinda juga akan menggelar aksi, maka kami berangkat untuk bersama-sama. Perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Dengan langkah terkoordinasi itu, Aliansi Kukar Menggugat menegaskan komitmennya menjaga konsistensi gerakan dan memperluas jangkauan perjuangan. Aksi ini sekaligus menunjukkan bahwa suara rakyat daerah tidak hanya berhenti di satu meja, tetapi terus bergerak hingga ke pusat pengambilan kebijakan.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i